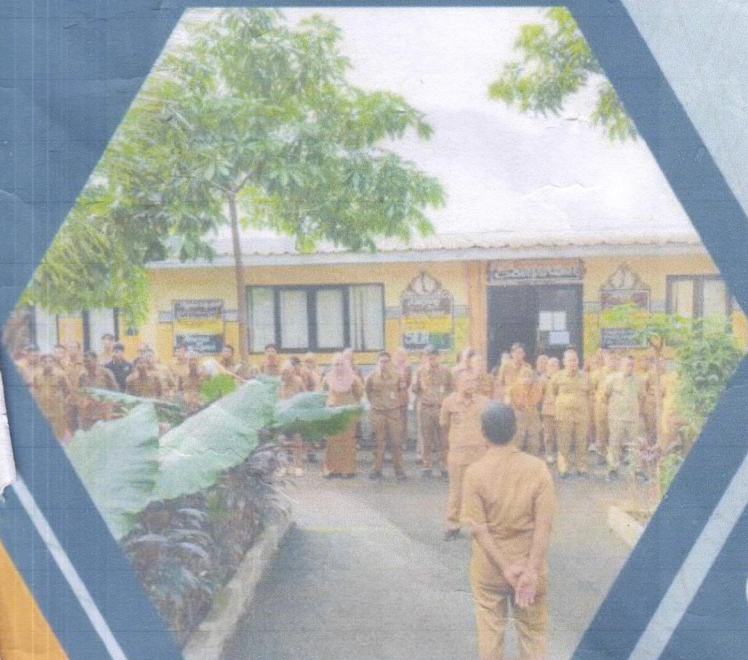


RENCANA KERJA (RENJA) 2025



DLH KABUPATEN PURWAKARTA



Jl. Purnawarman Timur Nomor 11 A

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya dapat Menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran kegiatan pertahun yang telah disusun dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2026.

Materi Penyusunan Kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026 dan Kegiatan -kegiatan lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang menyangkut Pelayanan Kepada Masyarakat yang ada dimasing-masing bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan, namun demikian diharapkan Program dan Kegiatan yang terkandung didalamnya dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah turut berperan serta didalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami menyampaikan banyak terimakasih dan kami menyadari masih banyak kekurangan mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, kami berharap ada koreksi, kritik dan saran membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini.

Purwakarta, 26 September 2024

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA**



DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum

NIP. 196705021992031009

Pembina Utama Muda /IV.c

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 latar belakang	1
1.2 landasan hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan	17
1.4 Sistematiks Penulisan	18
 BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun lalu dan capaian RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup	26
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	40
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	47
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	53
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup	74
3.3 Program dan Kegiatan	77
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4.1 Program dan Kegiatan	96
 BAB III PENUTUP	



BAB I PENDAHULUAN

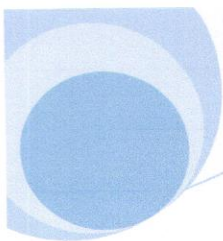
1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

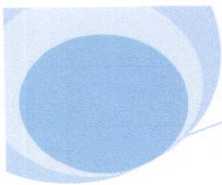
Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana



dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005 – 2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu : **“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAHLAKUL KARIMAH”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut, yaitu ;



Kesatu

Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berkhakul Karimah

Keempat

Menigkatnya ketersediaan infrastruktur dan penataan wilayah

Kedua

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Kelima

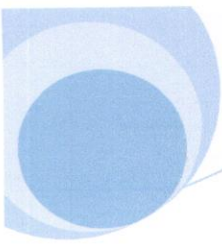
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Ketiga

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Dengan memperhatikan penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi kedua yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”**.

Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2026, menjadi penting bagi masyarakat Purwakarta dan juga penyelenggara Pemerintahan Daerah dan segenap pemangku kepentingan perkembangan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Pada Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 menyatakan bahwa visi Bupati Purwakarta adalah **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang



Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

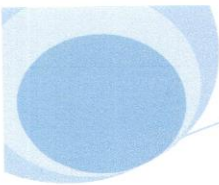
**Tabel 1.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Kedua : <i>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup</i>	➤ <i>Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</i>

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Dengan mengacu kepada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta tersebut di atas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akandicapai pada tahun 2025 – 2026, sehingga akan lebih fokus dan terarah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagaimana dimaksud diatas.



Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas , bahwa pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya terpadu untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijakan, perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan yang merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.

Secara umum arah pengembangan wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tentang Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031, ditujukan dalam rangka mewujudkan ***“Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan”***.

Tujuan pengembangan tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) kebijakan penataan ruang :

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (*Interchange*);
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
4. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan system perkotaan dan



kawasan strategis;

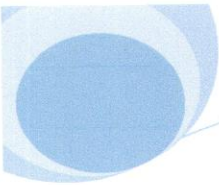
5. Pemanfaatan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berkaitan tujuan dan kebijakan diatas, serta selaras dengan arah pengembangan RT RW Nasional dan Provinsi, telah dirumuskan rencana pengembangan wilayah yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Dalam rencana pola ruang Kabupaten Purwakarta terdiri dari rencana pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dimaksud berupa kawasan hutan lindung, hutan konservasi, resapan air, sempadan sungai/waduk/situ/mata air, ruang terbuka hijau perkotaan, cagar budaya, daerah karst, daerah rawan bencana, dan perlindungan plasma nutfah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

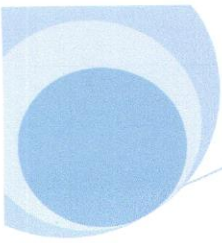
Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan urusan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
2. Minimnya sdm dan perlunya peningkatan sumber daya aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana yang optimal.
3. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kompetensi teknis di bidang Lingkungan, seperti PEDAL Ahli Pertama, Analis Lingkungan dan Pengelola Data Lingkungan, dengan latar belakang Pendidikan



S1 Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/ Teknik Fisika; SMA / Sederajat dan D (III) untuk Pengelola Data Lingkungan.

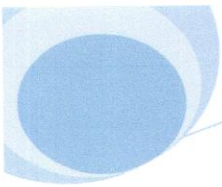
4. Kurangnya pengembangan kapabilitas dinamis dalam bentuk bimbingan teknis dan supervise dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi dalam rangka pembinaan pengelolaan Lingkungan.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga masih banyak desa yang belum mengikuti program Kampung Iklim serta keterbatasan data dan informasi tentang sumber daya alam di desa sehingga belum diperoleh data sumber mata air yang akurat di lapangan.
7. Pelaku usaha dan kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan belum optimal dalam menerapkan dokumen lingkungan, selain itu masih ada pelaku usaha yang belum mempunyai persetujuan lingkungan.
8. Kabupaten Purwakarta belum mempunyai *masterplan* Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
9. Perlu ditingkatkan cakupan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Purwakarta guna mengejar indeks tutupan lahan yang semakin menurun.
10. Menurunnya daya dukung daya tampung di wilayah Kabupaten Purwakarta yang diakibatkan tekanan dinamika jaman dan juga menurunnya pola kearifan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kelestarian lingkungan baik dipedesaan maupun perkotaan.
11. Masih terbatasnya anggaran untuk operasional laboratorium dan penunjang akreditasi laboratorium.
12. Masih terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kompetensi teknis di bidang pengujian kualitas Lingkungan dan pengelola keselamatan dan Kesehatan kerja dengan latar belakang Pendidikan D1/D3/D4 Analis kimia / D3 K3/S1 Teknik Kimia/Teknik Lingkungan.
13. Masih terbatasnya parameter terakreditasi sehingga kurangnya minat pelanggan (Pelaku usaha dan/atau Kegiatan serta masyarakat) untuk menggunakan jasa pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.



14. Belum terintegrasi sebagai laboratorium Lingkungan karena belum terpenuhinya persyaratan minimal untuk pengajuan laboratorium Lingkungan yang terintegrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Belum optimalnya sarana dan prasarana laboratorium sehingga pelayanan terhadap pelanggan tidak maksimal.
16. Belum tersedianya sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat.
17. Masih rendahnya intensitas pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha.
18. Belum terbentuknya tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum Lingkungan.
19. Belum meratanya pelaksanaan Pendidikan Lingkungan hidup bagi masyarakat.
20. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan Lingkungan hidup.

Secara umum kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Purwakarta relatif masih cukup baik, namun dalam perkembangannya pembangunan dan peningkatan penduduk yang terus bertambah menyebabkan tekanan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup cukup nyata di Purwakarta. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang memicu terjadinya perubahan lingkungan, sebagian besar pertambahan penduduk di Kabupaten Purwakarta berasal dari wargapendatang yang mencari pekerjaan di Purwakarta.

Banyaknya industri menjadi daya tarik tersendiri bagi warga pendatang untuk datang ke Kabupaten Purwakarta. Dampak peningkatan jumlah penduduk di Purwakarta menyebabkan lahan – lahan pertanian dan ruang terbuka hijau banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman, kemudian pertambahan jumlah sampah



domestik yang dihasilkan ikut mencemari lingkungan, dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan ikut pula menambah pencemaran udara di Kabupaten Purwakarta selain polusi dari cerobong industri.

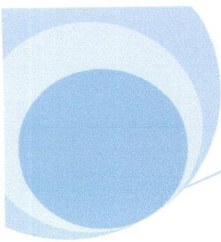
Upaya untuk menangani persoalan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan membutuhkan adanya keterpaduan dan koodinasi antar instansi melalui langkah-langkah koordinasi yang baik bahkan kalangan swasta dan masyarakat pun sangat dibutuhkan peran dan kesadarannya untuk mengantisipasi semakin kompleknya permasalahan lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

Jika melihat letaknya, Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107°30' – 107°40' Bujur Timur dan 6°25'– 6°45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Karawang dan Kab. Subang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 Desa dan 9 Kelurahan, 476 Dusun, 1.021 Rukun Warga (RW), dan 2.959 Rukun Tetangga (RT), seperti yang tergambar dalam Tabel berikut dibawah ini :



Tabel 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

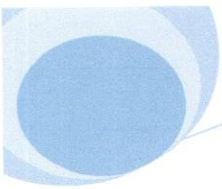
KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA /KELURAHAN
	KM ²	%	
1	2	3	4
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibat	54,66	5,63	10
17. Bungursari	56,50	5,81	10
JUMLAH	971,72	100,00	192

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu :

a. Wilayah Pegunungan

Wilayah ini terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100 – 2.036 meter di atas permukaan laut dan meliputi 29,73 persen dari total luas wilayah;



b. Wilayah Perbukitan

Wilayah ini terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500 – 1.100 meter di atas permukaan laut dan meliputi 33,80 persen dari total luas wilayah;

c. Wilayah Dataran

Wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35 - 499 meter di atas permukaan laut dan meliputi 36,47 persen dari total luas wilayah.

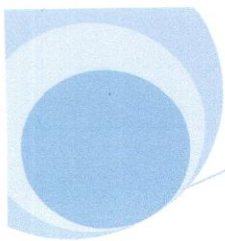
Gambaran Umum Demografis Wilayah Kabupaten Purwakarta tercermin dari jumlah Penduduk Purwakarta. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai sebanyak 852.521 jiwa. Sedangkan Hasil Sensus Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2020 mencapai sebanyak 997.869 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021, jumlah penduduk Purwakarta tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,82 persen.

Data jumlah penduduk yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada perbedaan, hal ini dikarenakan tidak samanya indikator yang digunakan, misalnya BPS tidak menghitung penduduk yang tidak berada di Kabupaten Purwakarta minimal selama 6 bulan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menghitung penduduk tersebut selama masih mempunyai KTP dan terdaftar di Kartu Keluarga. Dalam Dokumen RKPD ini kami menggunakan data dari BPS, dengan pertimbangan bahwa jumlah penduduk dari BPS menjadi dasar perhitungan untuk menentukan berbagai indikator makro pembangunan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional/pusat.

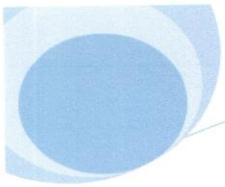
1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut

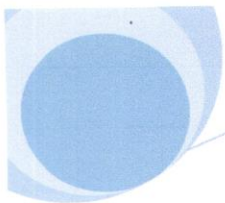
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat



2. (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

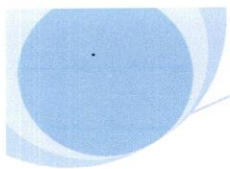


- Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Sunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor)
35. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2024-2026
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);



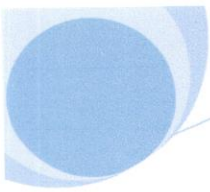
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya dokumen Renja Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS) ;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional ;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah ;



4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan ;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten dan LAKIP Perangkat daerah, dan penyusunan laporan lainnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dengan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.



1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

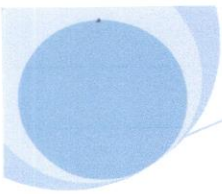
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2024 dan Perkiraan Pencapaian Tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana digambarkan pada tabel T.C. 29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan kajian terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan sebagaimana digambarkan pada tabel T.C. 30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan sebagaimana digambarkan pada tabel T.C. 31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para *stakeholders* yang terkait langsung dengan pelayanan sebagaimana digambarkan pada tabel T.C. 32.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

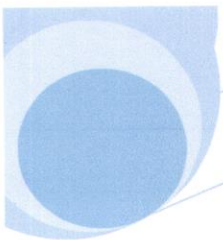
Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sebagaimana digambarkan pada tabel T.C. 33.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik.



BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, dan pada bagian ini akan diuraikan mengenai *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2025, serta progress pencapaian kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program dan kegiatannya.

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan juga merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.



A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikatorcapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28



Tabel T-C.28
Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
IKU Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,49	69,09	70,69	70,69
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75 %	75 %	75 %	75 %
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik



B. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp.39.716.338.660,- dengan 11 Program , 25Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan.



Tabel T-C.29.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
dan Capaian Renstra s/d Tahun 2025
Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Purwakarta

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

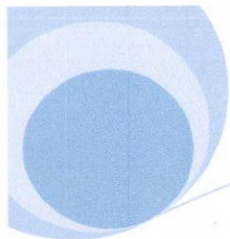
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
2.11.01.2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			28.544.350	36.499.962.344	37.001.900	50,53%		17.665.506.354,-	46,47%
2.11.01.2.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja Murni / 1 Dokumen Renja Perubahan	10.678.750	-	-	-	1Dokumen Renja Murni	11.400.000,-	76,00%
2.11.01.2.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen RKA-SKPD	-	14.651.700	13.659.800	93,23%	1Dokumen RKA-SKPD	17.050.000,-	85,25%
2.11.01.2.1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	-	-	-	1Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-



2.11.01.2.1.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen DPA SKPD	-	-	9.429.500	94,88%	1 Dokumen DPA SKPD	-	-
2.11.01.2.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	9.938.100	-	1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-
2.11.01.2.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan Lakip	-	14.900.200	13.912.500	93,37%	1 Laporan Lakip	-	-
2.11.01.2.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan LPPD	10.894.950	-	-	-	1 Laporan LPPD	-	-
2.11.01.2.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.653.209.018	12.915.714.659	6.493.258.215	48,37%		5.846.965.394	45,17%
2.11.01.2.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan 130 Orang	11.634.758.218	12.894.408.759	6.913.333.644	48,39%	115 Orang/Bulan	5.833.606.394	45,24%
2.11.01.2.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	-	-	-	-	100%	-	-
2.11.01.2.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.11.01.2.2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	9.966.350	9.600.000	4.800.000	32,01%	1 Dokumen	6.696.000	44,64%

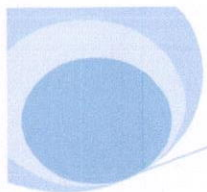


2.11.01.2.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.484.450	11.705.900	7.383.100	49,22 %	1 Laporan	6.663.000	44,42%
2.11.01.2.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	4 Laporan	-	-
2.11.01.2.2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	9.966.350	9.600.000	4.800.000	32,01 %	1 Dokumen	6.696.000	44,64%
2.11.01.2.3.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.698.250	-				2.100.000	10,50%
2.11.01.2.3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4.698.250	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah SKPD		-	-	-	-	4 Laporan	2.100.000	10,50%



Rencana Kerja Tahun 2025

2.11.01.2.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			207.139.000	1.119.219.000	569.060.000	91,05%		512.267.000	35,55%
2.11.01.2.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket Jas Hujan 1 Paket Boots 2 Paket Pakaian Petugas Kebersihan	199.581.000	1.069.219.000	567.000.000	98,61%	3 Paket	499.075.000	72,24%
2.11.01.2.5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	1 Dokumen	8.880.000	100,00%
2.11.01.2.5.05	Monitoring, Evaluasi, Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.11.01.2.5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	128 Orang	7.558.000	50.000.000	2.060.000	4,12 %	30 Orang	4.312.000	8,62%
2.11.01.2.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	513 Orang	-	-
2.11.01.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.168.432.705	6.503.617.862	2.389.969.560	43,33%		3.419.795.100	52,33%
2.11.01.2.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.869.750	-	-	-	1 Paket	-	-
2.11.01.2.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	177.850.000	-	-	-	100%	-	-



2.11.01.2.6.03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.144.500	44.998.800	10.026.400	22,28%	1 Paket	22.249.000	29,67%
2.11.01.2.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.787.206.980	6.286.519.062	2.314.654.650	43,79%	2 Paket	3.327.834.100	53,76%
2.11.01.2.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	42.165.000	72.500.000	36.220.000	72,44 %	1 Paket	42.000.000	70,00%
2.11.01.2.6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	21.500.000	25.000.000	2.800.000	11,20 %	1 Laporan	2.550.000	4,25%
2.11.01.2.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.696.475	74.600.000	26.268.510	35,21 %	1 Laporan	25.162.000	25,16%
2.11.01.2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	251.443.500	143.520.000	62,40%		-	-
2.11.01.2.7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	-	28.620.500	28.420.000	94,73 %	1 Unit	-	-
2.11.01.2.7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit Printer 2 Unit Face Detector 3 Unit Exhaustfan 3 Unit Laptop 5 Unit PC All In	-	222.823.000	115.100.000	57,55 %	17 Unit	-	-
2.11.01.2.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	2 Unit	-	-
2.11.01.2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.723.017.383	12.030.005.888	6.124.677.269	51,12%		6.181.329.260	50,26%



2.11.01.2.8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.400.000	5.000.000	1.000.000	20,00%	1 Laporan	1.600.000	22,86%
2.11.01.2.8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	194.171.445	249.973.584	75.969.922	30,39%	12 Laporan	82.804.010	30,11%
2.11.01.2.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.527.445.938	11.775.032.304	6.047.707.347	51,58%	1 Laporan	6.096.925.250	50,74%
2.11.01.2.04	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah									
2.11.01.2.04.03	Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan retribusi daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	-	-
2.11.01.2.04.07	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	-	-	-	-	-	48 Dokumen	-	-
2.11.01.2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.359.901.633	3.640.471.435	1.678.095.894	64,40 %		1.674.599.600	36,34%
2.11.01.2.9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan aplikasi IT (sistem informasi) lingkungan hidup kabupaten purwakarta	10 Unit	86.958.700	100.000.000	72.061.600	72,06 %	5 Unit	161.000	0,09%
2.11.01.2.9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya dokumen LPPD DLH	1 Unit Rekondisi Mobil Toilet 40 Unit Pengurusan Izin dan/atau Pajak 64 Unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lapangan	2.184.563.933	2.714.999.450	1.207.380.294	61,92 %	75 Unit	1.273.472.600	42,80%



Rencana Kerja Tahun 2025

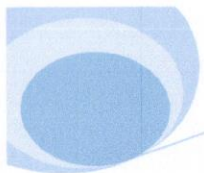
2.11.01.2.9.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang di Pelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	5 Unit	99.195.000	22,05%
2.11.01.2.9.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	-	-	-	-	2 Unit	-	-
2.11.01.2.9.06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Unit	-	125.471.985	-	-	123 Unit	3.435.000	1,25%



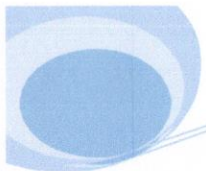
2.11.01.2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	3 Unit	-	700.000.000	-	-	2 Unit	298.336.000	45,90%
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			2.860.783.710	390.915.000	17.320.000	4,33 %		256.500.000	60,35%
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			195.092.000	390.915.000	17.320.000	4,33 %		256.500.000	65,11%
2.11.01.2.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	5 Dokumen	98.062.300	100.000.000	5.459.000	5,46 %	1 Dokumen	5.448.000	5,45%
2.11.01.2.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	5 Dokumen	24.037.625	290.915.000	11.861.000	3,95 %	1 Dokumen	251.052.000	85,40%
2.11.06.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kab/Kot									
2.11.06.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS/RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	-	-	-	-		1 Dokumen	-	-
2.11.06.2.02.02	Penyelenggaraan KLHS/RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	-	-	-	-		1 Dokumen	-	-
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			453.430.250	1.157.545.289	403.049.000	34,84 %		312.323.000	12,52%
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			173.925.000	1.082.545.289	361.733.000	33,42 %		128.132.000	7,88%



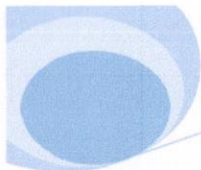
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	90 Dokumen	-	100.000.000	28.941.000	28,94%	2 Dokumen	19.729.000	26,31%
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	44 Dokumen	24.481.650	150.000.000	88.157.800	58,77 %	4Dokumen	99.136.000	22,86%
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen Proklim	35.705.500	150.148.000	101.853.300	67,84 %	1 Dokumen	28.996.000	2,43%
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji , Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	7 Dokumen	393.243.100	682.397.289	142.780.500	20,92%	5 Dokumen	155.912.000	20,79%
2.05.2.05.1.15.43	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			198.324.000	75.000.000	41.316.000	55,09%		8.550.000	19,54%
2.05.2.05.1.15.47	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	497.840.000	75.000.000	41.316.000	55,09%	1 Laporan	8.550.000	19,54%
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)			40.870.500	150.000.000	18.336.500	12,22 %			
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			22.420.500	50.000.000	12.268.000	24,54 %	-	-	-



2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tercapainya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 Laporan	22.420.500	50.000.000	12.268.000	24,54%	-	-	-
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			18.450.000	100.000.000	6.068.500	6,07%			
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	18.450.000	100.000.000	6.068.500	6,07%	-	-	-
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			299.946.000	126.376.000	36.835.700	12,28%		12.605.600	5,20%
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			299.946.000	126.376.000	36.835.700	12,28%		12.605.600	5,20%
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	167.223.500	-	-	-	1 Dokumen	-	-

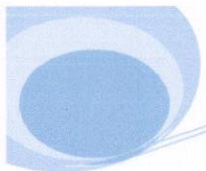


22.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	39.893.000	50.000.000	17.118.200	34,24 %	65 Badan Usaha	12.605.600	13,63%
22.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 Dokumen Pengawasan dan Pembinaan 1 Dokumen Verifikasi Pengaduan	92.829.500	76.376.000	19.717.500	19,72 %	4 Orang	-	-
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			225.886.625	300.000.000	88.796.500	29,60 %		42.214.000	15,35%
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			225.886.625	300.000.000	88.796.500	29,60 %		42.214.000	15,35%
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen Pembinaan Sekolah Adiwiyata 1 Dokumen Sosialisasi	101.729.275	250.000.000	81.918.500	32,77 %	2 Dokumen	35.850.000	17,93%
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	50 Orang	124.157.350	50.000.000	6.878.000	13,76 %	80 Orang	6.364.000	8,49%
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			69.570.000	75.000.000	-	-		-	-
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			69.570.000	75.000.000	-	-		-	-

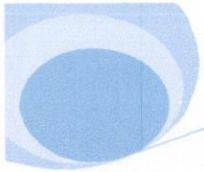


Rencana Kerja Tahun 2025

2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	69.570.000	75.000.000	-	-	20 Entitas	-	-
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			24.999.200	20.120.000	8.215.000	16,43 %		30.570.000	30,57%
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			24.999.200	20.120.000	8.215.000	16,43 %		30.570.000	30,57%
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	1 Dokumen	24.999.900	20.120.000	8.215.000	16,43 %	10 Pengaduan	8.004.000	16,01%
2.11.10.2.01.06	Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan Sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	11 Perkara	-	-	-	-	11 Perkara	22.566.000	45,13%
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan			795.535.200	2.949.001.800	950.934.400	17,73 %		401.054.942	13,24%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			795.535.200	2.949.001.800	950.934.400	17,73 %		401.054.942	13,24%
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pelaksanaan pelayanan pencegahan pencemaran udara	4 Laporan	-	449.643.400	143.775.000	35,98%	-	-	-
2.11.11.2.01.17	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		64.907 ton	271.097.000	1.535.000.000	456.303.100	10,86%	42890 Ton	204.152.442	9,07%
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		3 Kelompok	322.127.200	489.000.000	105.228.300	23,97%	2 Kelompok	195.702.500	54,48%



2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		3 Dokumen	162.311.000	475.358.400	245.628.000	75,49%	-	-	-
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	-	-
2.11.11.2.01.21	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1Dokumen	-	-	-	-	1Dokumen	1.200.000	3.00%
2.11.11.203	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			30.000.000		-	-		-	
2.11.11.203.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.11.11.203.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	-	-	30.000.000	85,71 %	100%	-	-
2.11.11.203.02	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-



2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)								19.349.000	45,53%
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								19.349.000	45,53%
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Ke Hati yang di susun	-	-	-	-	-	1Dokumen	19.349.000	45,53%
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								5.686.000	6,50%
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan lokal pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH									
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terakait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.11.07.2.01	Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH								5.686.000	11,37%
2.11.07.2.01.02	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah dokumen kelembagaan MHA kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.686.000	11,37%



Pada pencapaian pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2024, semua Program dan Kegiatan belum teralisasi secara maksimal dalam laporan triwulan 1. Diharapkan pelaksanaan program / kegiatan keberhasilan capaian kinerja fisik maupun keuangan mencapai 100 % sesuai dengan target rencana, dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.

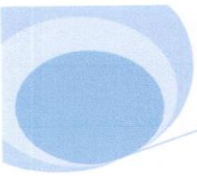
Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2025 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2025-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2 dalam tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan urusan wajib yang harus dikelola daerah Kabupaten/Kota yaitu salah satunya Urusan di Bidang Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016, dimana salah satu isinya adalah pembentukan lembaga teknis yang mengurus pengelolaan lingkungan hidup di daerah yaitu berbentuk Dinas Lingkungan Hidup.

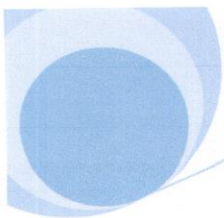
Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Purwakarta di Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanaan Administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 517 (lima ratus tujuh belas) orang pegawai yang berstatus PNS dengan berlatar belakang pendidikan dan bidang yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

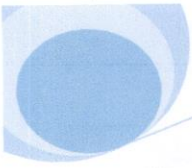


Tabel 2.3 Data Pegawai Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	2	3
1	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :	
	1. SD	24
	2. SMP	21
	3. SMA	42
	4. Sarjana Muda (D1 – D3)	-
	5. S 1 dan D 4	15
	6. S 2	5
	Jumlah	124 Orang
2	Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :	
	1. Golongan I	12
	2. Golongan II	23
	3. Golongan III	59
	4. Golongan IV	-
	Jumlah	124 orang
3	Pegawai berdasarkan jabatan :	
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	5
	3. Eselon IV	4
	4. Eselon V	14
	5. Staf	100
	Jumlah	124 orang
4	1. Pegawai Tenaga Tetap	49
	2. Pegawai Tenaga Harian Lepas	344
	Jumlah	393 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian

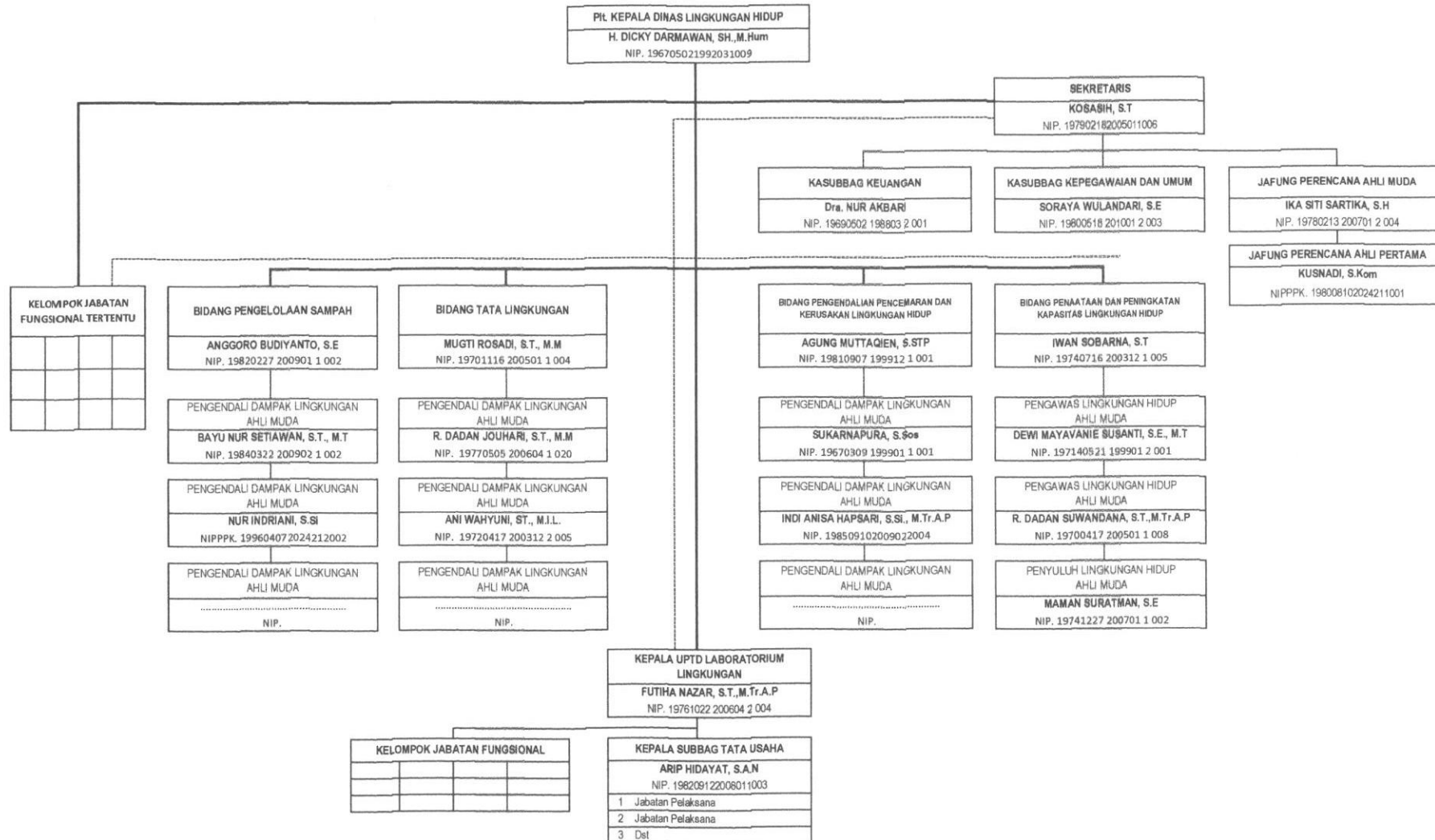
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat dan Susunan dan Peraturan Bupati 165 Tahun



2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - ❖ Perencana Ahli Muda Sub sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
 - ❖ Sub Bagian Keuangan;
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - ❖ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda.
6. Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - ❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - ❖ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - ❖ Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda.
7. UPTD Laboratorium
 - ❖ Kepala Subbag Tata Usaha
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Bupati Purwakarta
Nomor : 36 Tahun 2023
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup



atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi pelayanan pada masyarakat yang didasari atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian di dukung dengan Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Walau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa urusan lingkungan hidup termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan atau hambatan dalam memberikan pelayanan dibidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat, karena pelayanan bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal demi terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

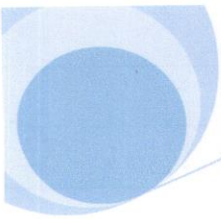
Pelayanan bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan. Adapun fungsi pelayanan yang di maksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pencemaran Air;
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atautanah untuk produksi biomassa;
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup.



TABEL T-C 30
ANALISA KINERJA PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis	
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021		2022
				1	2	3	4	5		6	7		8
	SPM Permen LH No.19 tahun 2008												
1	% jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	-	100%	100 titik	120 titik	120 titik	150 titik	89 titik	100 titik	120 titik		
	% jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyarat an administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	-	100%	20 titik	30 titik	30 titik	50 titik	20 titik	20 titik	30 titik		
	% luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	-	100%	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	2 lok/titik	-	2 lok/titik	2 lok/titik		
	% jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang di Tindaklanjuti	90%	-	90%	65%	80%	85%	90%	105,9%	85%	90%		



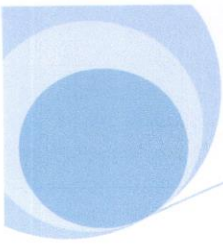
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditentukan oleh banyak faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan. Sumber daya tersebut harus dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapaisesuai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung pecapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Perencanaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan suatu daerah. Perencanaan telah disusun melalui proses yang melibatkan seluruh stakeholder sehinggamenghasilkan dokumen yang akan menjadi pedoman pelaksanaan yang nantinya akan dibiayai melalui APBD

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun ke belakang ,tantangan dan peluang yang ada dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas lingkungan Hidup berdasarkan tugas pokok dan fungsi,yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Isu strategis penyebab kerusakan lingkungan di wilayah Purwakartasebagian besar berasal dari alih fungsi lahan. Pemanfaatan lahan menjadi dilematis dengan perkembangan penduduk yang semakin pesat, lahan pertanian yang dahulunya sangat luas dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi menjadi terbatas karena tuntutan kebutuhan lahan untuk perkembangan lahansector industri, jasa dan property yang semakin meningkat. Pada tatanan tradisi di Jawa Barat ada pepatah dalam bahasa sunda yang merupakan penggunaan tata guna lahan dari wilayah atas sampai wilayah pesisir yaitu : *"Gunung kaian, pasir talunan, sampalan kebonan, gawir awian, daratan imahan, susukan caian, legok balongan, walungan rawateun, dataran sawahan, basisir jagaeun"*.

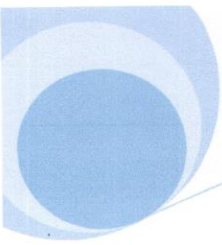


Yang artinya (*gunung kaian*) gunung harus penuh kayu-kayuan merupakan hutan, (*Pasir talunan*) bukit – bukit harus dikelola untuk hutan dan kebun, (*sampalan kebonan*) antara bukit dan gunung dikelola untuk kebun, (*gawir awian*) pada wilayah jurang-jurang atau yang terjal harus terjaga tanaman bambunya, (*daratan imahan*) daerah yang tidak berbukit dan struktur tanahnya kurang subur diperuntukan untuk rumah, (*susukan caian*) sungai kecil harus berair berarti mata air harus tetap ada, (*susukan caian*) daerah yang cekung harus menjadi penampungan air berupa situ – situ (*balong*) untuk budidaya ikan, (*walungan rawateun*) sungai besar sebagai penampung air dari sungai-sungai kecil harus dipelihara agar bisa memberikan sumber air ke wilayah lain dibawahnya, (*dataran sawahan*) wilayah yang landai dan cukup luas diperuntukan untuk lahan pertanian basah, dan (*basisir jagaeun*) pesisir pantai perlu dijaga untuk keseimbangan dari wilayah laut agar tidak terjadi kerusakan pada wilayah daratan. Bahwa tatanan ini mungkin sudah tidak dikenal, ataupun dilupakan. Bahkan prinsip kearifan lokal seperti ini sudah banyak yang ditinggalkan, sehingga kita saat ini secara tidak langsung sedang menunggu kehancuran lingkungan disekitar kita.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Purwakarta seiring dengan dinamika dan pengembangan Kabupaten sebagai berikut:

1. Bidang Penuaan dan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya intensitas pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha
- b. Kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketaLingkungan, penegak hukum Lingkungan, serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Belum meratanya pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup bagi masyarakat.

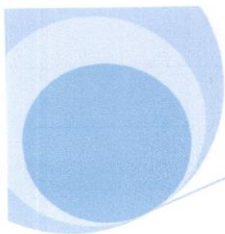


2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan perlu pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi teknis di bidang lingkungan
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai pengelola administrasi data lingkungan
- c. Lemahnya pengembangan kapabilitas dinamis dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- d. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- e. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan
- f. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran agar seluruh rencana bisa berjalan dengan baik
- g. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi.

3. Bidang Tata Lingkungan

- a. Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga masih banyak desa yang belum mengikuti program iklim
- b. Keterbatasan data sumber daya alam/sumber mata air yang akurat sesuai kondisi di lapangan
- c. Menurunnya daya dukung tampung di wilayah Kabupaten Purwakarta yang diakibatkan tekanan dinamika jaman
- d. Perlu ditingkatkan cakupan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Purwakarta guna mengejar indeks tutupan lahan yang semakin menurun



- e. Menurunnya pola kearifan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kelestarian lingkungan baik pedesaan maupun perkantoran
- f. Masih ada pelaku usaha yang belum mempunyai izin pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- g. Belum optimalnya penerapan UKL-UPL dan RKL-RPL
- h. Kabupaten Purwakarta belum mempunyai masterplan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

4. Bidang Persampahan

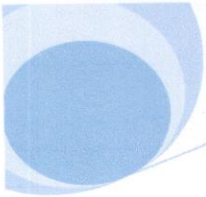
- a. Roadmap Kebijakan Teknis Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan belum tersusun dengan baik dikarenakan kekurangan SDM di Sub-Substansi Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan
- b. Pengangkutan Sampah masih kurang maksimal dari Tempat Penampungan Sampah sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, dikarenakan Keterbatasan unit/jumlah Kendaraan Angkutan Persampahan dan SDM dari awak Kendaraan Angkutan Persampahan dan SDM dari awak Kendaraan Angkutan Persampahan itu sendiri
- c. Masih minimnya alokasi pagu anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan dan penyediaan sarpras Pengelolaan Kebersihan dan Angkutan Persampahan, sehingga pelayanan kurang maksimal
- d. Minimnya koordinasi dalam penetapan lokasi TPS, sehingga tumpukan sampah masih dapat ditemui tertumpuk di pinggir jalan
- e. Minimnya koordinasi dengan pihak swasta dalam pengangkutan sampah organik dan non organik



- f. Belum adanya aplikasi retribusi yang memadai
- g. Belum lengkapnya sarana prasarana retribusi
- h. Program digitalisasi belum sempurna
- i. Sarana prasarana mobil/kendaraan sedot tinja kurang baik roda empat atau roda tiga (cator tinja)
- j. Instalasi pengolahan limbah tinja sudah tidak layak pakai/harus di renovasi
- k. Pembinaan kepada petugas retribusi
- l. Sarana prasarana petugas retribusi
- m. Belum adanya jembatan timbang, sehingga data volume sampah yang masuk ke TPA belum dapat di pastikan angkanya
- n. Akses jalan menuju zona buang rusak, sehingga menyulitkan proses pembuangan sampah
- o. Pengolahan air lindi belum maksimal

5. UPTD Laboratorium

- a. Masih terbatasnya anggaran untuk operasional laboratorium dan penunjang akreditasi laboratorium;
- b. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten;
- c. Masih terbatasnya parameter terakreditasi;
- d. Belum ter-registrasi sebagai laboratorium Lingkungan;
- e. Sarana dan prasarana laboratorium belum optimal



a. Faktor Internal :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat menjembatani antara Perusahaan dan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup sehingga apa yang diinginkan oleh berbagai pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan terencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mengikuti sertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan maupun teknis lainnya.

3. Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana terus dilakukan dalam upaya tuntutan tugas ke depannya dalam mendukung manajemen pengelolaan bidang lingkungan hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

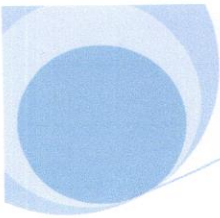
4. Anggaran

Peningkatan Anggaran Bidang Lingkungan Hidup yang tidak terlalu signifikan yang diberikan oleh APBD mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup.

b. Faktor Eksternal :

1. Globalisasi

Perkembangan Kemajuan Teknologi dan Industri di era globalisasi ini, menuntut Pemerintah Daerah mengikuti perkembangan teknologi agar aparatur dapat bersaing tinggi dan dituntut untuk memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang sejajar. Pertumbuhan industri yang maju juga berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya, bisa mengakibatkan global warming yang mempengaruhi udara ambient.



Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kab.Purwakarta dituntut untuk siap menghadapi segala permasalahan lingkungan hidup pada era globalisasi ini.

2. Peraturan Perundang – Undangan

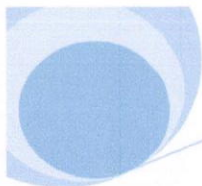
Penegakan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup harus benar – benar dilaksanakan agar adanya efek jera terhadap usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran baik udara, tanah maupun air. Disatu pihak Dinas Lingkungan Hidup harus sebagai Stakeholder di Bidang Lingkungan Hidup dituntut untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ini secara baik dan tegas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun berpedoman pada RPD Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Purwakarta, yang mana sampai dengan saat Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini disusun belum diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan review atas RKPD 2025.

Tabel T-C 31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

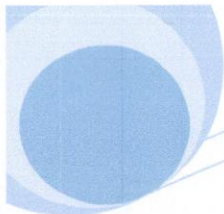
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				26,081,843,254	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				26,081,843,254	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	10,000,000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,802,167,950	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,802,167,950	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oang/Bulan	12,762,167,950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oang/Bulan	12,762,167,950	
Pelaksanaan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi	Dokumen	10,000,000	

	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Pelaksanaan Akuntansi SKPD		dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	10,000,000		Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		10,000,000	



Tabel T-C 31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				26,081,843,254	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				26,081,843,254	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	10,000,000	

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	25,000,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	25,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Purwakarta	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	25,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50,000,000	
Sosialisasi Pertauran Perundang-Undangan	Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pertauran Perundang-Undangan	Orang	30,000,000	Sosialisasi Pertauran Perundang-Undangan	Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pertauran Perundang-Undangan	Orang	30,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				390,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				390,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Paket	100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Paket	100,000,000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Paket	30,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Paket	30,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	
	Pengadaan Alat Besar	Purwakarta	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Alat Besar	Purwakarta	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Mebel	Purwakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purwakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12,239,675,304	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12,239,675,304	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	250,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	250,000,000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	11,984,675304	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	11,984,675304	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	150,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Purwakarta	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Purwakarta	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Purwakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Unit	30,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purwakarta	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprass Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprass Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprass Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	

			Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saprasi Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				300,000,000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				300,000,000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota				300,000,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota				300,000,000	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	Dokumen	-	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	Dokumen	-	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	300,000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	300,000,000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				-					-	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Purwakarta	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Purwakarta	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-	
	Pembuatan dan	Purwakarta	Jumlah Dokumen KLHS	Dokumen	-	Pembuatan dan	Purwakarta	Jumlah Dokumen KLHS	Dokumen	-	

Pelaksanaan KLHS RPJDRPJMMD		RPJDRPJMMD Kabupaten/Kota yang Disusun			Pelaksanaan KLHS RPJDRPJMMD		RPJDRPJMMD Kabupaten/Kota yang Disusun			
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				-	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				-	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup(LAB)				1,000,000,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1,000,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	Purwakarta	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Purwakarta	Perserntase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen	-	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Purwakarta	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1,000,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Purwakarta	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1,000,000,000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				900,000,000					900,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Purwakarta	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	Dokumen	150,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Purwakarta	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Dokumen	150,000,000	

	Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut		Tanah, Air, Udara, dan Laut			Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim		Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim			
	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK	Purwakarta	Jumlah Dokumen data Inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK	Dokumen	250,000,000	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK	Purwakarta	Jumlah Dokumen data Inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK	Dokumen	250,000,000	
	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Purwakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan	200,000,000	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Purwakarta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan	200,000,000	
	Pelaksanaan Upaya mitigasi perubahan iklim kabupaten/kota	Purwakarta	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	50,000,000	Pelaksanaan Upaya mitigasi perubahan iklim kabupaten/kota	Purwakarta	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	50,000,000	
	Penyusunan Dokumen status Lingkungan Hidup daerah	Purwakarta	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	100,000,000	Penyusunan Dokumen status Lingkungan Hidup daerah	Purwakarta	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	100,000,000	
	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Purwakarta	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan	50,000,000	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Purwakarta	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan	50,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	100,000,000	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				300,000,000					300,000,000	

	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Purwakarta	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	300,000,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Purwakarta	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	300,000,000	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				200,000,000					200,000,000	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				200,000,000					200,000,000	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Purwakarta	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	200,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Purwakarta	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	200,000,000	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				200,000,000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				200,000,000	

	Pengelolaan keanekaragaman Hayati kabupaten/kota				200,000,000	Pengelolaan keanekaragaman Hayati kabupaten/kota				200,000,000	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Purwakarta	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	200,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Penyimpanan Sementara Limbah B3	Purwakarta	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	200,000,000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Purwakarta	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	-	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Purwakarta	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	-	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				400,000,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				400,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLHDiterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota				400,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLHDiterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota				400,000,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Purwakarta	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	150,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Purwakarta	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Dokumen	150,000,000	
	Pengawasan Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Purwakarta	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang di awasi	Badan Usaha	250,000,000	Pengawasan Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Purwakarta	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang di awasi	Badan Usaha	250,000,000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Purwakarta	Peresentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya	Dokumen	-	
	Program Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				100,000,000					100,000,000	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				100,000,000					100,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	100,000,000	

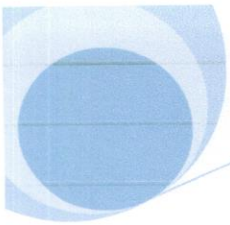
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				50,000,000					50,000,000	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	50,000,000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen	50,000,000	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				250,000,000	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				250,000,000	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				250,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				250,000,000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Purwakarta	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	100,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Purwakarta	Persentase Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup	Dokumen	100,000,000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Purwakarta	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	Orang	100,000,000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Purwakarta	Lokasi	Orang	100,000,000	
	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan pemukiman yang sehat	Purwakarta	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	keluarga	50,000,000	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan pemukiman yang sehat	Purwakarta	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	keluarga	50,000,000	

	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				100,000,000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				100,000,000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				100,000,000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				100,000,000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengeloaan LH	Purwakarta	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	100,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengeloaan LH	Purwakarta	Persentase Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengeloaan LH	Entitas	100,000,000	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				350,000,000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				350,000,000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				350,000,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				350,000,000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	Dokumen	200,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	200,000,000	
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Purwakarta	Jumlah penerapan sanksi administrative yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	150,000,000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Purwakarta	Jumlah penerapan sanksi administrative yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	150,000,000	

	Program Pengelolaan Persampahan				10,684,495,406	Program Pengelolaan Persampahan				10,684,495,406	
	Pengelolaan Sampah				10,684,495,406	Pengelolaan Sampah				10,684,495,406	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Purwakarta	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	-	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Purwakarta	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	-	
	Penyusunan rencana Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Purwakarta	Jumlah Dokumen kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang di susun	Dokumen	-	Penyusunan rencana Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Purwakarta	Jumlah Dokumen kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang di susun	Dokumen	-	
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Purwakarta	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	6,000,000,000	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Purwakarta	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	6,000,000,000	
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan Kembali sampah	Purwakarta	Jumlah sampah yang di manfaatkan	Dokumen	-	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan Kembali sampah	Purwakarta	Jumlah sampah yang di manfaatkan	Dokumen	-	

Penyediaan dan operasionalisasi sarana dan pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Purwakarta	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	-	Penyediaan dan operasionalisasi sarana dan pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Purwakarta	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	-	
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Purwakarta	Jumlah saran dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	3,184,495,406	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Purwakarta	Jumlah saran dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	3,184,495,406	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan	Purwakarta	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan	Ton	1,500,000,000	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan	Purwakarta	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan	Ton	1,500,000,000	
Penyusunan Kebijakankerja sama pengelolaan persampahan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	-	Penyusunan Kebijakankerja sama pengelolaan persampahan	Purwakarta	Jumlah Dokumen Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	-	

Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Oleh Swasta						Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Oleh Swasta					
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purwakarta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah Yang Difasilitasi	Laporan	-		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purwakarta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah Yang Difasilitasi	Laporan	-	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta				-		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta				-	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	-		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	-	
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Purwakarta	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	-		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Purwakarta	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	-	
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	-		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	-	
TOTAL				40.716.338.660						40.716.338.660	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dimana RKPD Kabupaten Purwakarta itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, terutama Pembangunan Daerah periode ke 5 Tahun 2024 -2026. Selain itu juga, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pula target RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026 dan prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan arah kebijakan dan Program Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 – 2026 .

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005 – 2025 yang berkaitan dengan Tantangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional periode RPJM 2020 – 2024 adalah Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan Pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK



Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020 - 2024, Visi Pembangunan 2020 – 2024 adalah **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Visi pembangunan diatas diurai menjadi 7 m isi pembangunan dan diurai kembali menjadi 9 agenda prioritas atau yang disebut pula dengan **NAWACITA**.

Nawacita merupakan 9 agenda prioritas pembangunan nasional pemerintah periode 2015 – 2019, dimana ada 4 Nawacita yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu :

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Mewujudkan kemnadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik;
3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum;
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 akan memprioritaskan pembangunan (Sasaran Strategis Nasional) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicapai pada :

1. Peningkatan Produk hasil hutan dan pengembangan Jasa lingkungan :
 - a. Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu;
 - b. Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
2. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS :
 - a. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan;
 - b. Peningkatan Konservasi dn Keanekaragaman Hayati;
 - c. Peningkatan Pengelolaan DAS.



3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Perekonomian Kehati :
 - a. IKLH meningkat menjadi 66,5-68,6 di Tahun 2019;
 - b. Meningkatnya pemanfaatan Iptek dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati sebesar 100 %.
4. Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan :
 - a. Menurunnya emisi GRK di 5 sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi dan industri dan limbah) sebesar mendekati 26 % di Tahun 2019;
 - b. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 daerah rentan yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN API.

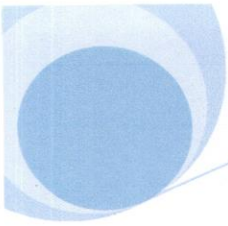
Selain itu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026, pembangunan Dinas Lingkungan Hidup ditempatkan pada misi ke 2 yaitu **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup**, dimana uraian dari misi ke 2 ini adalah bertujuan untuk :

Tujuan 1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Tujuan 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

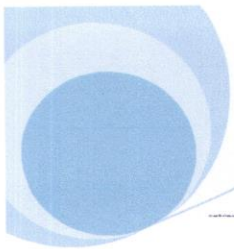
Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk jangka waktu tahun 2025– 2026 adalah sebagai berikut :

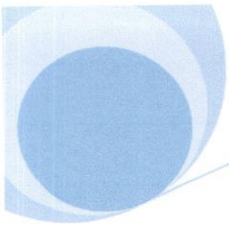
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Namun demikian Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.1**



TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67.49	69.09	70.69	70.69
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75%	75%	75%	75%
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	100
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	BB	BB	BB



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam menentukan usulan program dan Rencana Kegiatan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup senantiasa mengacu kepada arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Purwakarta (RPD) dan Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Tahun 2024. Visi Pembangunan Purwakarta untuk periode 2024 - 2026 adalah “**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**” dimana maksud dan penjelasan dari visi ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadisemangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila. Pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara, dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.

Program Pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup misi Kabupaten Purwakarta yaitu: **Misi “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup”** dengan program pembangunan sebagai berikut:

Tabel T-C 3.3

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakira Maju Tahun 2026
Kabupaten Purwakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakira Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				26.081.843.254				36.170.236.178
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70,000,000				70,000,000
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersedia Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000

2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000
2.11.01..02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.802.167.950				12.602.167.950
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Orang/Bulan	12.762.167.950	APBD		Orang/Bulan	12.562.167.950
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000

2.11.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000
2.11.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Laporan	10,000,000	APBD		Laporan	10,000,000
2.11.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Purwakarta	Laporan	10,000,000	APBD		Laporan	10,000,000
2.11.01.203.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30,000,000				30,000,000
2.11.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Dokumen	10,000,000	APBD		Dokumen	10,000,000
2.11.01.203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta	Laporan	10,000,000	APBD		Laporan	10,000,000
2.11.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta	Laporan	10,000,000	APBD		Laporan	10,000,000
2.11.1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				90,000,000				140,000,000

2.11.204.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	0
2.11.204.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	0
2.11.204.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Purwakarta	Laporan	0	APBD		Laporan	0
2.11.204.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	50,000,000
2.11.204.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Purwakarta	Laporan	15,000,000	APBD		Laporan	15,000,000
2.11.204.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Purwakarta	Dokumen	50,000,000	APBD		Dokumen	50,000,000
2.11.204.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Purwakarta	Dokumen	25,000,000	APBD		Dokumen	25,000,000
2.11.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				280,000,000				430,000,000
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	Paket	0	APBD		Paket	150,000,000
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Purwakarta	Dokumen	150,000,000	APBD		Dokumen	150,000,000
2.11.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Purwakarta	Dokumen	25,000,000	APBD		Dokumen	25,000,000

Rencana Kerja Tahun 2025

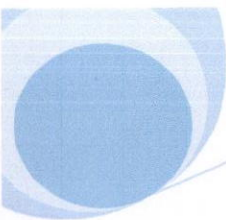
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Purwakarta	Dokumen	25,000,000	APBD		Dokumen	25,000,000
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta	Orang	50,000,000	APBD		Orang	50,000,000
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purwakarta	Orang	30,000,000	APBD		Orang	30,000,000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				390.000.000				7,220,000,000
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta	Paket	30,000,000	APBD		Paket	50,000,000
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta	Paket	30,000,000	APBD		Paket	50,000,000
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta	Paket	100.000.000	APBD		Paket	6,890,000,000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Purwakarta	Paket	100.000.000	APBD		Paket	100,000,000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Paket	30,000,000	APBD		Paket	30,000,000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	Paket	100,000,000	APBD		Paket	100,000,000

2.11.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0				810,000,000
2.11.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	525,000,000
2.11.01.207.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	10,000,000
2.11.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	100,000,000
2.11.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	75,000,000
2.11.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	100,000,000
2.11.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.239.675.304				12.291.675.304
2.11.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Laporan	5,000,000	APBD		Laporan	7,000,000
2.11.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta	Laporan	250,000,000	APBD		Laporan	300,000,00
2.11.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta	Laporan	11,984.675.304	APBD		Laporan	11.984.675.304

2.11.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180.000.000				2.576.392.924
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Purwakarta	Unit	150.000.000	APBD		Unit	130.000.000
2.11.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	1.786.392.924
2.11.01.209.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	50.000.000
2.11.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Purwakarta	Unit	30.000.000	APBD		Unit	50.000.000
2.11.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	10.000.000
2.11.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	50.000.000
2.11.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	500.000.000

2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				300,000,000				300,000,000
2.11.02.201	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota				300,000,000				300,000,000
2.11.02.201.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	Purwakarta	Dokumen	300.000.000	APBD		Dokumen	300.000.000
2.11.02.202	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0				0
2.11.02.202.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	0
2.11.02.202.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	0
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				1.000,000,000				1.025,000,000

2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut (UPTD Laboratorium)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	100,000,000
2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Purwakarta	Dokumen	1.000,000,000	APBD		Dokumen	925,000,000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				900,000,000				1.050,000,000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Purwakarta	Dokumen	150,000,000	APBD		Dokumen	300,000,000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Purwakarta	Dokumen	100,000,000	APBD		Dokumen	100,000,000
2.11.03.2.01.05	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Purwakarta	Dokumen	250.000.000	APBD		Dokumen	250.000.000
2.11.03.2.01.06	Pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang di susun	Purwakarta	Laporan	200.000.000	APBD		Laporan	200.000.000



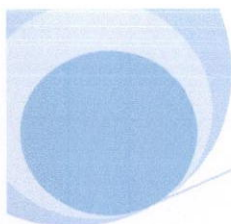
2.11.03.2.01.10	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Purwakarta	Laporan	50.000.000	APBD		Laporan	50.000.000
2.11.03.2.01.11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status Lingkungan hidup yang di susun	Purwakarta	Dokumen	100.000.000	APBD		Dokumen	100.000.000
2.11.03.2.01.14	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Purwakarta	Laporan	50.000.000	APBD		Laporan	50.000.000

2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				300.000.000				300.000.000
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Purwakarta	Laporan	300.000.000	APBD		Laporan	300.000.000
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				200.000.000				300.000.000
2.11.04.201	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				200.000.000				300.000.000
2.11.04.201.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			200.000.000				300.000.000
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				0				0
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3				0				0
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Purwakarta	Laporan	0	APBD		Laporan	0

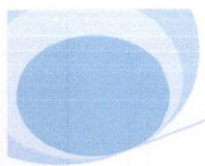
2.11.06.201	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				400.000.000				450.000.000
2.11.06.201	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemda Kab/Kota				400.000.000				450.000.000
2.11.06.201	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Purwakarta	Dokumen	150.000.000	APBD		Dokumen	200.000.000
2.11.06.201.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Laporan	0	APBD		Laporan	0
2.11.06.201.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	0
2.11.06.2.01.09	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan penegelolaan Lingkungan hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang di awasi	Purwakarta	Badan Usaha	250.000.000	APBD		Badan Usaha	250.000.000

2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan HAK MHA yang Terkait dengan PPLH				150.000.000				150.000.000
2.11.07.201	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan HAK MHA yang Terkait dengan PPLH				100.000.000				100.000.000
2.11.07.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Purwakarta	Dokumen	100.000.000	APBD		Dokumen	100.000.000
2.11.07.202	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA yang Terkait dengan PPLH				50.000.000				50.000.000
2.11.07.202.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan HAK MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan HAK MHA yang Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dalam Penguatan	Purwakarta	Dokumen	50.000.000	APBD		Dokumen	50.000.000

2.11.07.202	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				250,000,000				275,000,000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah				250,000,000				275,000,000
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Purwakarta	Dokumen	100,000,000	APBD		Dokumen	75,000,000
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	Purwakarta	Orang	100,000,000	APBD		Orang	150,000,000
2.11.08.2.01.04	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas Lingkungan hidup dan pemukiman yang sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	Purwakarta	Keluarga	50,000,000	APBD		Keluarga	50,000,000
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				100,000,000				150,000,000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah				100,000,000				150,000,000
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Purwakarta	Entitas	100,000,000	APBD		Entitas	150,000,000

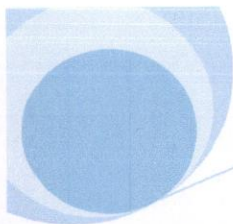


2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				350,000,000				350,000,000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				350,000,000				350,000,000
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang di tanganni	Purwakarta	Pengaduan	200,000,000	APBD		Pengaduan	200,000,000
2.11.10.2.01.06	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang di kenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan/ yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupate/kota	Purwakarta	Perkara	150,000,000	APBD		Perkara	150,000,000
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan				10.684.495.406				10.830,000,000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				10.684.495.406				10.830,000,000
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Purwakarta	Kelompok	0	APBD		Kelompok	225.000.000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	105,000,000



Rencana Kerja Tahun 2025

		Sampah dan Mengacu pada Jakstrada							
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Rencana Kerja Tahun 2025

2.11.11.2.01.07	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Penangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	0
2.11.11.2.01.08	Penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	0
2.11.11.2.01.12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pengangkutan	Purwakarta	Ton	6.000.000.000	APBD		Ton	6.000.000.000
2.11.11.2.01.13	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	Purwakarta	Ton	0	APBD		Ton	100.000.000
2.11.11.2.01.14	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Jumlah sarana pemilahan ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Purwakarta	Unit	0	APBD		Unit	0
2.11.11.2.01.15	Penangan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Purwakarta	Unit	3.184.495.406	APBD		Unit	1.800.000.000
2.11.11.2.01.17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan	Purwakarta	Ton	1.500.000.000	APBD		Ton	1.800.000.000

2.11.11.2.01.21	Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang di tetapkan	Purwakarta	Dokumen	0	APBD		Dokumen	0
2.11.11.202	Penerbitan Izin Pendarulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemroresan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta				0				0
2.11.11.202.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Purwakarta	Rekomendasi	0	APBD		Rekomendasi	0
2.11.11.203	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				0				0
2.11.11.203.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Purwakarta	Laporan	0	APBD			0
2.11.11.203.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Purwakarta	Unit	0	APBD			0
2.11.11.203.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Jumlah Belanja Operasional	Jumlah Belanja Operasional	Jumlah Belanja Operasional	Jumlah Belanja Operasional	Dokumen	2.11.11.203.03
JUMLAH BELANJA OPERASIONAL					Jumlah Belanja Operasional	Jumlah Belanja Operasional	Jumlah Belanja Operasional	Jumlah Belanja Operasional	Jumlah Belanja Operasional



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tahun 2025 secara keseluruhan disajikan pada uraian berikut ini :

Uraian Indikatif Program Rencana Kinerja DLH Tahun 2025

Program yang ada di bidang Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan untuk periode tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH;
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Program Penanganan Lingkungan Hidup;
11. Program Pengelolaan Persampahan;

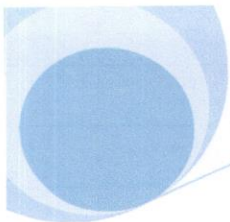
**Rencana Indikatif Kegiatan Tahun 2025****➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 70.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 10,000,000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 10,000,000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 10,000,000
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 10,000,000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp. 10,000,000
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 10,000,000
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10,000,000
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.802.167.950
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 12.762.167.950
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 10,000,000
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp. 10,000,000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 10,000,000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 10,000,000
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 30,000,000



1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 10.000.000
2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 10.000.000
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 10.000.000
	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 90,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 0
2.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 0
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 0
4.	Pendataan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp. 0
5.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp. 15,000,000
6.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Rp. 50.000.000
7.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 25.000.000
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 280,000,000
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 0
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 150,000,000
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 25,000,000
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 25,000,000
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 50,000,000



6.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 30,000,000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 390.000.000
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 30,000,000
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 30,000,000
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 100.000.000
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 100.000.000
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 30,000,000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 100.000.000
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 0
	Sub Kegiatan :	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 0
2.	Pengadaan Alat Besar	Rp. 0
3.	Pengadaan Mebel	Rp. 0
4.	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Rp. 0
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 0
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12,239.675.304
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5,000,000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 250,000,000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 11,984.675.304

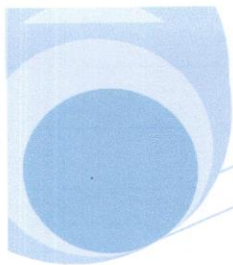


	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 180.000.000
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 150.000.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 0
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp. 0
4.	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Rp. 30.000.000
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0

➤ **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

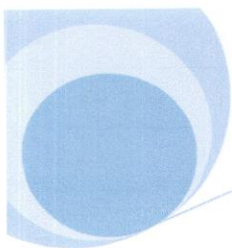
No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 300.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 0
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 300.000.000
	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp. 0
	Sub Kegiatan :	
1.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp. 0
2.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp. 0



➤ **Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota(LAB)	Rp. 1.000.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp. 0
2.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 1.000.000.000
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 900.000.000
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp. 150.000.000
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 100.000.000
3.	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan propil emisi GRK	Rp. 250.000.000
4.	Pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp. 200.000.000
5.	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Rp. 50.000.000
6.	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Rp. 100.000.000
7.	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Rp. 50.000.000



	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 300.000.000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 300.000.000

➤ **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

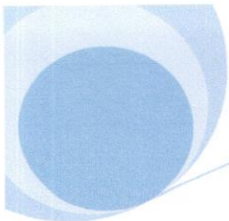
Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp. 200,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 200,000,000

➤ **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 0
	Sub Kegiatan :	
1.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 0



➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 400,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 150,000,000
2.	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rp. 250.000.000
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp. 0

➤ **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait dengan PPLH**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp. 100,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rp. 100,000,000

	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp. 50,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Rp. 50,000,000

➤ **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

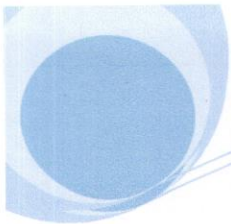
Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 250,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp. 100,000,000
2.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp. 100,000,000
3.	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	Rp. 50,000,000

➤ **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 100,000,000



➤ **Program Penanganan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

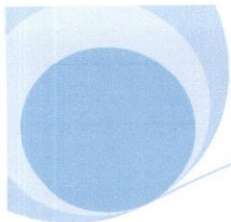
Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 350,000,000
	Sub Kegiatan :	
1.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	Rp. 200,000,000
2.	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp. 150,000,000

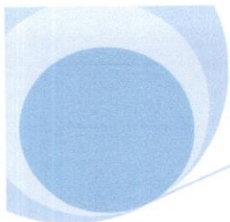
➤ **Program Pengelolaan Persampahan**

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Indikatif Kegiatan	Anggaran Murni 2025
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Rp. 10.684.495.406
	Sub Kegiatan :	
1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Rp. 0
2.	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp. 0
3.	Penyediaan sarana dan prasaranapengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA/ Kabupaten/kota	Rp. 0



4.	Penyusunan rencana kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Rp. 0
5.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Rp. 6.000,000,000
6.	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Rp. 0
7.	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Rp. 0
8.	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Rp. 3,184,495,406
9.	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Rp.1,500,000,000
10	Penyusunan kebijakan kerja sama pengolahan persampahan	Rp.0
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengeolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemroresan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Rp. 0
	Sub Kegiatan :	
1.	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 0
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Rp. 0
	Sub Kegiatan :	
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Rp. 0



2.	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp. 0
3.	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Rp. 0



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dina Lingkungan Hidup Periode 2025 –2026, dimana Renstra dibuat sebagai upaya memberikan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2025 – 2026, khususnya yang terkait dengan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam penyusunan usulan rencana kegiatan tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dan diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara terencana, sistematis, mengandung nilai, bobot dan mampu mendorong serta memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025 dalam penyusunan Rencana dan Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.



Selain itu dukungan maupun Political Will dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang penga wasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Setiap perencanaan tentu membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak karena masih banyak kekurangannya, terutama pada saat implementasi serta operasional dilapangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan mudah – mudahan dapat di akomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berikutnya. Kerjasama dan sinergitas adalah kunci utama dalam suksesnya suatu organisasi.



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA
TAHUN : 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,49	69,09
			Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	75%	75%
			Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	BB